

## Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perdata

Muhammad Adam Ratdiawan<sup>1</sup>, Raihansditya<sup>2</sup>, M. Faisal Rahendra Lubis<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1mhdadmrtwn30@gmail.com](mailto:mhdadmrtwn30@gmail.com), [2raihanaditya115@gmail.com](mailto:raihanaditya115@gmail.com), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

### ABSTRAK

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata memainkan peran penting dalam memastikan bahwa klaim yang diajukan di pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat. Dua alat bukti yang sering digunakan dalam perkara perdata adalah saksi dan keterangan ahli. Saksi memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung, sementara keterangan ahli membantu menjelaskan aspek teknis atau kompleks yang relevan dengan perkara. Artikel ini membahas peran saksi dan keterangan ahli dalam sistem pembuktian perdata, mekanisme pengajuan bukti di persidangan, serta tantangan dan efektivitas penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

**kata kunci : saksi dan keterangan ahli, alat bukti**

### ABSTRACT

*The evidentiary system in civil procedural law plays an important role in ensuring that claims filed in court have a strong legal basis. Two types of evidence that are often used in civil cases are witnesses and expert testimony. Witnesses provide information based on direct experience, while expert testimony helps explain technical or complex aspects that are relevant to the case. This article discusses the role of witnesses and expert testimony in the civil evidentiary system, the mechanism for submitting evidence in court, and the challenges and effectiveness of its application in legal practice in Indonesia.*

**Keywords : witnesses and expert testimony, evidence**

#### I. Pendahuluan A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum acara perdata, pembuktian memegang peran krusial dalam menentukan hasil persidangan. Hakim tidak dapat membuat keputusan berdasarkan asumsi atau dugaan, melainkan harus mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, kehadiran saksi dan keterangan ahli dalam persidangan menjadi elemen penting yang berkontribusi terhadap kejelasan fakta dan validitas hukum dalam suatu perkara. Saksi memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung

atas kejadian yang disengketakan, sementara ahli berfungsi untuk memberikan analisis teknis terhadap aspek yang memerlukan keahlian khusus. Pembuktian dalam hukum perdata memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan hukum pidana. Saksi memiliki peran utama dalam mengungkap fakta berdasarkan pengalaman langsung yang mereka ketahui. Keterangan saksi dapat digunakan untuk memperkuat atau membantah dalil hukum yang diajukan dalam persidangan. Namun, agar keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, saksi harus memberikan

keterangan yang objektif, konsisten, dan tidak bertentangan dengan bukti lain yang telah diajukan. Selain itu, saksi yang memiliki kepentingan pribadi dalam perkara biasanya dianggap kurang kredibel karena potensi bias dalam keterangannya.

Saksi membantu mengungkap fakta dari sudut pandang orang yang mengalami langsung kejadian, sementara ahli memberikan penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuan agar hakim dapat menilai suatu kasus secara lebih objektif. Oleh karena itu, kedua alat bukti ini memiliki posisi yang sangat signifikan dalam proses hukum acara perdata.

Meskipun saksi dan keterangan ahli memiliki peran penting, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah aspek kredibilitas saksi dan netralitas keterangan ahli. Saksi yang memberikan keterangan dengan bias atau ketidakjujuran dapat menyesatkan jalannya persidangan, sedangkan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak berpotensi memberikan pendapat yang menguntungkan pihak tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum harus memiliki mekanisme yang dapat menilai kredibilitas saksi dan memastikan bahwa keterangan ahli tetap objektif dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pengaturan mengenai saksi dan keterangan ahli telah diatur dalam berbagai regulasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) serta peraturan khusus yang mengatur mekanisme

pembuktian. Namun, efektivitas penerapannya masih menjadi tantangan, terutama dalam perkara yang membutuhkan analisis teknis mendalam. Untuk memastikan keadilan dalam persidangan perdata, diperlukan penguatan sistem pembuktian yang lebih transparan dan berintegritas.

## **1. Konsep Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki peran krusial dalam menentukan kebenaran hukum dalam suatu perkara. Dalam setiap persidangan, pihak yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan klaimnya dengan alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip dasar pembuktian dalam hukum perdata adalah bahwa "barang siapa mengajukan tuntutan, maka ia harus membuktikannya" (*actori incumbit onus probandi*). Oleh karena itu, pembuktian menjadi proses penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

## **2. Peran Saksi dalam Persidangan Perdata**

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam sistem pembuktian perdata. Kesaksian diberikan oleh seseorang yang mengetahui atau mengalami langsung suatu kejadian yang menjadi dasar dari gugatan yang diajukan. Saksi dapat membantu mengungkap fakta berdasarkan pengalaman pribadi, sehingga informasi yang diberikan dapat memperkuat atau membantah klaim dari salah satu pihak yang

bersengketa. Kesaksian yang diberikan harus dilakukan di bawah sumpah untuk memastikan kejujuran dan keabsahannya dalam proses peradilan.

### **3. Kredibilitas dan Validitas Keterangan Saksi**

Tidak semua saksi memiliki kredibilitas tinggi dalam suatu persidangan. Hakim harus memastikan bahwa kesaksian yang diberikan tidak bersifat bias atau menguntungkan salah satu pihak secara tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengujian terhadap kesaksian yang diberikan, termasuk pemeriksaan silang antara pihak penggugat dan tergugat. Kesaksian yang tidak konsisten atau bertentangan dengan bukti lain dapat mengurangi nilai probatifnya dalam persidangan.

### **4. Peran Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perdata**

Dalam beberapa kasus perdata, terdapat fakta yang membutuhkan penjelasan teknis atau keahlian khusus agar dapat dipahami oleh hakim. Keterangan ahli diberikan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang tertentu, seperti kedokteran, teknik, akuntansi, atau lingkungan. Berbeda dengan saksi, keterangan ahli tidak diberikan berdasarkan pengalaman langsung, tetapi berdasarkan analisis ilmiah yang dilakukan terhadap suatu fakta dalam perkara.

### **5. Fungsi Keterangan Ahli dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Keterangan ahli berfungsi untuk membantu hakim dalam menilai aspek teknis dalam suatu perkara. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa konstruksi, seorang insinyur dapat memberikan penjelasan mengenai kualitas bangunan yang disengketakan. Dalam kasus medis, seorang dokter ahli dapat menjelaskan kondisi kesehatan seseorang yang menjadi dasar dari klaim dalam suatu gugatan. Dengan adanya keterangan ahli, hakim dapat membuat putusan yang lebih akurat dan adil berdasarkan pengetahuan yang lebih mendalam.<sup>1</sup>

### **6. Perbandingan Peran Saksi dan Keterangan Ahli**

Saksi dan keterangan ahli memiliki peran yang berbeda dalam pembuktian perdata. Saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman pribadi yang langsung terjadi, sedangkan ahli memberikan analisis berdasarkan ilmu dan keahlian profesionalnya. Oleh karena itu, saksi lebih relevan dalam perkara yang bersifat faktual, sementara ahli lebih dibutuhkan dalam kasus yang memerlukan penilaian teknis atau ilmiah. Kedua alat bukti ini saling melengkapi dalam sistem pembuktian perdata.<sup>2</sup>

---

Nugroho, A. (2021). "Analisis Perbandingan Pembuktian Saksi dan Ahli dalam Sistem Peradilan Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7 No. 1, pp. 45-60.

## **7. Tantangan dalam Penggunaan Saksi dan Keterangan Ahli di Persidangan**

Meskipun memiliki peran penting, terdapat berbagai tantangan dalam penggunaan saksi dan keterangan ahli di persidangan. Salah satu kendala utama adalah potensi saksi memberikan keterangan yang bias atau tidak objektif. Saksi yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak mungkin memberikan kesaksian yang menguntungkan pihak tersebut. Selain itu, keterangan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak dapat dipandang tidak netral, terutama jika ahli tersebut memiliki kepentingan dalam perkara.

## **8. Regulasi dan Penguatan Mekanisme Pembuktian**

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, regulasi mengenai saksi dan keterangan ahli telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg). Namun, masih diperlukan penguatan mekanisme dalam pengujian validitas kesaksian dan keterangan ahli agar persidangan berjalan lebih objektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa ahli yang dihadirkan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan keterangannya benar-benar berdasarkan kaidah ilmiah yang sah.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian mengenai peran saksi dan keterangan ahli dalam sistem pembuktian perdata menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum acara perdata mengatur mekanisme pembuktian melalui saksi dan ahli, serta bagaimana prinsip-prinsip hukumnya diterapkan dalam persidangan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan sistem pembuktian perdata dan menganalisis efektivitas peran saksi serta keterangan ahli dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kesaksian dan pendapat ahli berkontribusi dalam proses peradilan serta tantangan yang muncul dalam penerapannya.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan akademik, seperti Peraturan dan Undang-Undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) serta peraturan terkait pembuktian hukum di

Indonesia. Putusan Pengadilan, terutama yang berkaitan dengan pembuktian saksi dan keterangan ahli dalam perkara perdata. Jurnal dan Artikel Ilmiah yang membahas aspek hukum acara perdata dan sistem pembuktian. Buku dan Literatur Hukum yang memberikan referensi teoritis terkait pembuktian perdata.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen. Peneliti mengkaji berbagai peraturan hukum, keputusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan dengan topik pembuktian dalam hukum acara perdata. Studi dokumen ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran saksi dan keterangan ahli dalam sistem peradilan.

#### **5. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan putusan pengadilan dan praktik hukum yang terjadi dalam persidangan. Melalui metode ini, penelitian berupaya menggambarkan bagaimana penerapan pembuktian melalui saksi dan ahli dalam kasus-kasus perdata yang telah diputuskan.

## **II. Hasil Penelitian**

### **1. Pentingnya Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan klaim yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dalam sistem peradilan, pembuktian berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa dalil yang dikemukakan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa pembuktian yang kuat, persidangan hanya akan menjadi ajang klaim sepihak tanpa dasar yang jelas, sehingga proses peradilan tidak dapat berjalan dengan objektif dan adil.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dilakukan melalui berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, bukti tertulis, keterangan ahli, bukti elektronik, dan pengakuan para pihak. Setiap jenis alat bukti memiliki nilai probatif yang berbeda, tergantung pada relevansinya terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai sejauh mana bukti yang diajukan dapat dijadikan sebagai dasar putusan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pembuktian yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dalam setiap sengketa perdata.

Selain berfungsi untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum, pembuktian juga berperan dalam menjaga integritas sistem peradilan. Dengan adanya prosedur pembuktian yang ketat, potensi manipulasi atau pemalsuan bukti dapat

diminimalisir, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan fakta hukum yang ada. Tanpa sistem pembuktian yang baik, putusan hakim dapat menjadi kurang akurat dan berpotensi merugikan pihak yang sebenarnya berhak memperoleh keadilan.

Pembuktian dalam hukum acara perdata juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa setiap perkara diproses dengan prosedur pembuktian yang transparan dan adil, mereka akan lebih percaya pada institusi peradilan sebagai tempat penyelesaian sengketa secara resmi. Sebaliknya, jika sistem pembuktian tidak diterapkan dengan baik dan sering kali menghasilkan putusan yang tidak berlandaskan fakta hukum, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan dapat menurun.

## **2. Peran Saksi dalam Mengungkap Fakta Hukum**

Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, terutama dalam hukum acara perdata, karena dapat membantu mengungkap fakta hukum yang terjadi dalam suatu perkara. Kesaksian yang diberikan oleh saksi berfungsi sebagai bukti yang dapat mendukung atau membantah klaim dari salah satu pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus, saksi menjadi alat bukti utama, terutama jika perkara tersebut tidak memiliki dokumen atau bukti fisik yang dapat secara langsung membuktikan peristiwa yang disengketakan. Oleh karena itu, keberadaan

saksi menjadi faktor penentu dalam pencarian kebenaran hukum.

Salah satu fungsi utama saksi adalah memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung terhadap suatu kejadian yang berkaitan dengan perkara hukum. Seorang saksi yang melihat atau mengalami suatu peristiwa dapat membantu hakim memahami apa yang sebenarnya terjadi, sehingga putusan yang diberikan lebih mencerminkan fakta hukum yang ada. Tanpa keterangan saksi, banyak perkara dapat mengalami kesulitan dalam menemukan titik terang, terutama jika pihak yang bersengketa memiliki versi yang berbeda mengenai kejadian yang sama.

Keabsahan kesaksian saksi sangat bergantung pada kredibilitas dan kejujuran dalam memberikan keterangan. Saksi harus memberikan informasi secara objektif dan tidak berpihak kepada salah satu pihak secara tidak sah. Oleh karena itu, kesaksian saksi diberikan di bawah sumpah untuk memastikan bahwa keterangan yang disampaikan jujur dan dapat dipercaya. Jika seorang saksi memberikan kesaksian yang tidak benar, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum karena memberikan keterangan palsu di persidangan, yang dapat menghambat proses pencarian keadilan.

Dalam banyak kasus, saksi juga berperan dalam memperjelas bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Misalnya, jika terdapat dokumen yang tidak memiliki konteks yang jelas, saksi yang mengetahui latar belakang dokumen tersebut dapat

memberikan penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa dokumen tersebut dibuat. Hal ini membantu hakim untuk menilai bukti yang diajukan dengan lebih baik dan memahami relevansi serta keabsahan dokumen dalam perkara yang sedang diperiksa.

Meskipun saksi memiliki peran yang sangat penting, tantangan dalam penggunaannya tetap ada. Salah satu kendala terbesar adalah potensi saksi memberikan kesaksian yang bias atau dipengaruhi oleh pihak yang bersengketa. Saksi yang memiliki hubungan langsung dengan salah satu pihak mungkin cenderung memberikan keterangan yang menguntungkan pihak tersebut. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa saksi yang dihadirkan memiliki objektivitas dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perkara yang sedang berlangsung.

### **3. Kredibilitas Saksi dalam Persidangan**

Kredibilitas saksi dalam persidangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai probatif dari kesaksiannya. Hakim dan pihak yang berperkara harus dapat menilai apakah saksi memberikan keterangan yang jujur, objektif, dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Saksi yang memiliki kredibilitas tinggi akan membantu proses persidangan berjalan dengan lebih transparan dan adil, sedangkan saksi yang tidak kredibel dapat menyesatkan jalannya persidangan dan berpotensi menghambat pencarian keadilan.

Salah satu aspek utama dalam menilai kredibilitas saksi adalah kejujuran dalam memberikan keterangan. Saksi harus mampu menyampaikan informasi yang benar dan tidak dibuat-buat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Jika saksi memberikan kesaksian palsu, ia tidak hanya melemahkan proses persidangan tetapi juga dapat dikenakan sanksi hukum karena menghambat peradilan yang jujur dan transparan. Oleh karena itu, kesaksian dalam persidangan biasanya diberikan di bawah sumpah untuk memastikan bahwa saksi tidak memberikan keterangan yang menyesatkan.

Selain kejujuran, konsistensi kesaksian juga menjadi indikator utama kredibilitas saksi. Saksi yang memiliki kredibilitas tinggi akan memberikan keterangan yang sama sejak awal hingga akhir persidangan, tanpa adanya perubahan atau kontradiksi yang mencurigakan. Jika saksi memberikan kesaksian yang berubah-ubah atau bertentangan dengan bukti lain yang telah diajukan, maka hakim dapat meragukan validitas keterangannya dan mempertimbangkan bobotnya dalam penilaian akhir.<sup>3</sup>

Faktor lain yang mempengaruhi kredibilitas saksi adalah ketidakberpihakan dan independensi dalam memberikan keterangan. Saksi yang memiliki hubungan langsung dengan salah satu pihak yang bersengketa berpotensi memberikan

---

<sup>3</sup> Priyatmoko, D. (2019). "Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 5 No. 2, pp. 78-95.

kesaksian yang bias atau tidak objektif. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa saksi yang dihadirkan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keterangannya. Dalam beberapa kasus, jika ditemukan bahwa saksi memiliki keterlibatan dalam sengketa, keterangannya dapat dianggap kurang kredibel dan tidak dijadikan sebagai bukti utama dalam persidangan.

Selain aspek pribadi dari saksi, pengaruh eksternal juga dapat memengaruhi kredibilitas kesaksiannya. Saksi bisa saja mengalami tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak tertentu yang ingin mempengaruhi keterangannya dalam persidangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi saksi sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan kesaksian secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. Program perlindungan saksi yang diterapkan dalam sistem hukum menjadi salah satu cara untuk menjaga keamanan dan kredibilitas kesaksian dalam perkara yang sensitif.

#### **4. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata**

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perdata. Berbeda dengan saksi yang memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman langsung terhadap suatu kejadian, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dan analisis terhadap aspek teknis atau ilmiah dalam suatu perkara. Dalam kasus perdata yang

kompleks, seperti sengketa medis, keuangan, atau lingkungan, pendapat ahli sangat diperlukan untuk membantu hakim memahami isu yang membutuhkan pengetahuan spesialis.

Dalam sistem hukum acara perdata, keterangan ahli digunakan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak dapat diungkap hanya melalui kesaksian saksi atau bukti tertulis. Misalnya, dalam sengketa kontrak bisnis, seorang ahli akuntansi dapat memberikan analisis terkait laporan keuangan perusahaan yang bersengketa. Begitu pula dalam perkara medis, seorang dokter spesialis dapat menjelaskan dampak suatu tindakan medis terhadap kesehatan seseorang yang menjadi objek sengketa hukum. Dengan demikian, keterangan ahli membantu hakim memperoleh pemahaman yang lebih objektif dalam mengambil keputusan.

Keabsahan dan kredibilitas keterangan ahli sangat bergantung pada kompetensi dan independensi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Seorang ahli harus memiliki keahlian yang relevan dengan perkara serta memberikan pendapat yang berbasis penelitian dan standar ilmiah yang telah diakui. Jika seorang ahli memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan salah satu pihak, maka objektivitas keterangannya dapat diragukan. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa ahli yang

dihadirkan benar-benar netral dan tidak memihak.<sup>4</sup>

Selain itu, mekanisme pengujian terhadap pendapat ahli juga perlu dilakukan dalam persidangan. Hakim dan pihak yang berperkara memiliki hak untuk mengajukan pemeriksaan silang guna menguji konsistensi dan validitas keterangan ahli. Jika terdapat lebih dari satu ahli yang memberikan pendapat yang bertentangan, maka pengadilan dapat melakukan perbandingan terhadap argumentasi masing-masing ahli sebelum menentukan bobot keterangannya dalam perkara yang diperiksa. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang tetapi mempertimbangkan berbagai analisis yang ada.

Meskipun keterangan ahli berperan penting dalam penyelesaian perkara perdata, ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah biaya tinggi untuk menghadirkan ahli, terutama dalam kasus yang membutuhkan analisis teknis mendalam. Selain itu, ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak bisa memberikan pendapat yang menguntungkan pihak tersebut, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas persidangan. Oleh karena itu, sistem hukum perlu membangun regulasi yang lebih ketat mengenai seleksi ahli dan menetapkan

standar yang jelas dalam penerimaan pendapat ahli sebagai alat bukti.

## **5. Fungsi Keterangan Ahli dalam Penyelesaian Sengketa Perdata**

Dalam penyelesaian sengketa perdata, keterangan ahli memiliki peran yang sangat penting dalam membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah dari suatu perkara. Berbeda dengan saksi yang memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman langsung, ahli memberikan pendapat berdasarkan analisis profesional dan keilmuan yang mereka kuasai. Dalam banyak kasus, permasalahan hukum tidak hanya melibatkan fakta sederhana tetapi juga membutuhkan interpretasi dari sudut pandang akademis atau praktis. Oleh karena itu, keterlibatan ahli dalam persidangan membantu memperjelas hal-hal yang sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis yang memadai.

Salah satu fungsi utama keterangan ahli adalah menjelaskan aspek teknis dalam suatu sengketa yang memerlukan pemahaman mendalam. Dalam perkara sengketa konstruksi, misalnya, seorang insinyur ahli dapat memberikan analisis mengenai kualitas bahan bangunan dan apakah standar konstruksi telah dipatuhi. Begitu pula dalam kasus medis, dokter ahli dapat menjelaskan hubungan antara tindakan medis dengan akibat yang ditimbulkan terhadap pasien. Dengan adanya keterangan ahli, hakim dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih

---

Priyatmoko, D. (2019). "Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 5 No. 2, pp. 78-95.

komprehensif terhadap masalah hukum yang terjadi.

Selain memberikan penjelasan teknis, keterangan ahli juga berfungsi sebagai alat bukti yang dapat menguatkan atau membantah klaim para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Pendapat seorang ahli yang didasarkan pada penelitian, standar industri, atau pengalaman profesional dapat digunakan untuk menilai apakah suatu dalil memiliki dasar yang valid. Jika salah satu pihak mengklaim bahwa suatu produk cacat dan merugikan mereka, misalnya, seorang ahli teknis dapat menganalisis apakah produk tersebut memang memiliki kelemahan atau kesalahan produksi yang menyebabkan kerugian tersebut.

Hakim juga dapat menggunakan keterangan ahli untuk membantu menentukan nilai dan kompensasi dalam sengketa perdata. Dalam perkara mengenai ganti rugi, misalnya, seorang ahli ekonomi atau akuntansi dapat memberikan perhitungan mengenai besaran kerugian yang dialami oleh penggugat. Begitu juga dalam kasus pembagian warisan atau hak kekayaan intelektual, ahli hukum atau ahli waris dapat memberikan pandangan tentang bagaimana hak-hak tersebut harus dibagi secara adil berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendapat ahli ini, putusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan nilai ekonomi dan hukum yang tepat.

Namun, penting untuk memastikan bahwa keterangan ahli yang diberikan bersifat netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Ahli yang memiliki kepentingan dalam perkara dapat memberikan pendapat yang cenderung menguntungkan pihak yang mengajukan mereka sebagai saksi.

## **6. Perbandingan Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perdata**

Dalam sistem pembuktian perdata, saksi dan keterangan ahli memiliki peran yang berbeda namun sama-sama penting dalam membantu hakim mengambil keputusan yang adil. Saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman langsung terhadap suatu peristiwa, sementara ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dan analisis terhadap aspek teknis atau ilmiah dari perkara yang sedang diperiksa. Perbedaan ini menjadikan saksi lebih berperan dalam mengungkap fakta yang terjadi, sedangkan keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan atau menafsirkan fakta-fakta yang membutuhkan pengetahuan khusus. Salah satu aspek utama yang membedakan saksi dan keterangan ahli adalah dasar informasi yang diberikan dalam persidangan. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri, sedangkan ahli memberikan opini berdasarkan ilmu pengetahuan dan standar profesional dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, saksi lebih relevan dalam perkara yang berkaitan dengan kejadian faktual,

---

Nugroho, A. (2021). "Analisis Perbandingan Pembuktian Saksi dan Ahli dalam Sistem Peradilan Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7 No. 1, pp. 45-60

sementara ahli lebih dibutuhkan dalam kasus-kasus yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek teknis atau ilmiah.

Selain perbedaan dalam sumber informasi, objektivitas juga menjadi faktor pembeda antara saksi dan ahli. Saksi bisa saja memiliki hubungan emosional atau kepentingan pribadi dalam perkara, yang berpotensi mempengaruhi kesaksiannya. Di sisi lain, ahli diharapkan bersikap netral dan memberikan pendapat berdasarkan standar keilmuan yang berlaku. Meskipun demikian, ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak tetap bisa memberikan opini yang menguntungkan pihak tersebut, sehingga pengadilan harus melakukan pemeriksaan silang untuk menguji validitas pendapat yang diberikan.

Dari segi pengaruh dalam persidangan, kesaksian saksi sering kali menjadi bukti utama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki dokumentasi tertulis atau bukti fisik yang kuat. Sementara itu, keterangan ahli lebih berperan dalam memperjelas bukti yang telah diajukan dan memberikan interpretasi terhadap data atau dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Hakim biasanya mempertimbangkan keduanya secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang suatu sengketa hukum.<sup>6</sup>

## **7. Tantangan dalam Penggunaan Saksi di Persidangan**

---

Dalam sistem persidangan, penggunaan saksi sebagai alat bukti menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas kesaksiannya. Salah satu tantangan utama adalah kredibilitas saksi, di mana hakim harus memastikan bahwa saksi memberikan keterangan yang jujur dan objektif. Saksi yang memiliki kepentingan pribadi dalam perkara berpotensi memberikan kesaksian yang bias, sehingga kesaksiannya dapat diragukan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengujian terhadap konsistensi kesaksian saksi sebelum digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Selain kredibilitas, ingatan dan ketepatan kesaksian juga menjadi tantangan dalam persidangan. Seiring berjalannya waktu, saksi mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat secara rinci peristiwa yang mereka saksikan, sehingga ada kemungkinan terjadi perbedaan dalam kesaksian yang diberikan. Hal ini bisa menyebabkan kesaksian tidak memiliki akurasi tinggi, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak detail atau terjadi beberapa tahun sebelum persidangan. Oleh karena itu, hakim harus mampu menilai apakah kesaksian yang diberikan masih relevan dan akurat.

Tantangan lain dalam penggunaan saksi di persidangan adalah potensi intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu. Saksi sering kali menghadapi ancaman atau tekanan dari pihak yang berkepentingan untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan mereka atau bahkan memilih untuk tidak

bersaksi sama sekali. Dalam beberapa kasus, saksi mungkin takut akan dampak hukum atau sosial dari keterangannya, sehingga memilih untuk memberikan kesaksian yang kurang transparan. Untuk mengatasi hal ini, sistem hukum perlu menyediakan perlindungan saksi agar mereka dapat memberikan keterangan dengan aman tanpa takut akan konsekuensi negatif.

Selain faktor tekanan eksternal, kemampuan komunikasi saksi dalam memberikan kesaksian juga menjadi kendala. Tidak semua saksi memiliki kemampuan berbicara dengan jelas dan runtut dalam menguraikan kejadian yang mereka alami atau saksikan. Ada saksi yang gugup atau tidak terbiasa berbicara di depan umum, sehingga membuat keterangannya sulit dipahami. Dalam situasi ini, hakim dan pengacara perlu membantu saksi menyampaikan keterangannya dengan lebih baik melalui pertanyaan yang terstruktur dan penyederhanaan bahasa hukum yang digunakan dalam persidangan.

#### **8. Mekanisme Pengujian Keterangan Ahli dalam Persidangan**

Untuk memastikan bahwa keterangan ahli tetap objektif, hukum acara perdata mengatur mekanisme pengujian terhadap pendapat yang diberikan. Hakim dapat melakukan pemeriksaan silang terhadap ahli dengan mengajukan pertanyaan yang menguji konsistensi dan validitas pendapatnya. Selain itu, jika terdapat lebih

dari satu ahli dalam suatu perkara, maka pengadilan dapat membandingkan pendapat mereka untuk memperoleh analisis yang lebih akurat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam sistem hukum acara perdata, pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Saksi dan keterangan ahli merupakan dua alat bukti utama yang membantu hakim memahami fakta serta aspek teknis dari kasus yang sedang diperiksa. Meskipun saksi dan keterangan ahli memiliki peran penting, penerapannya dalam sistem peradilan sering kali menghadapi tantangan. Kredibilitas saksi menjadi faktor yang harus diuji secara cermat, karena ada kemungkinan kesaksiannya bias atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. dalam sistem peradilan yang memastikan.

#### **B. SARAN**

Untuk meningkatkan efektivitas peran saksi dalam sistem pembuktian perdata, perlu adanya mekanisme yang lebih ketat dalam menilai kredibilitas dan objektivitas kesaksian. Pengadilan harus memastikan bahwa hanya saksi yang memiliki pengetahuan langsung dan tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memberikan keterangan. Selain itu, perlindungan hukum bagi saksi harus ditingkatkan, terutama bagi mereka yang memberikan kesaksian dalam perkara yang sensitif, agar mereka merasa

aman dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak yang bersengketa.

Dalam hal keterangan ahli, diperlukan standar yang lebih jelas mengenai kualifikasi dan kompetensi ahli yang diperbolehkan memberikan pendapat dalam persidangan. Pengadilan perlu membangun sistem yang memungkinkan seleksi ahli berdasarkan rekam jejak profesional dan objektivitasnya. Selain itu, transparansi dalam penyampaian pendapat ahli harus ditingkatkan, sehingga pendapat yang diberikan dapat diuji secara lebih kritis oleh hakim dan pihak yang berperkara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Priyatmoko, D. (2019). "Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia". *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 5 No. 2, pp. 78-95.
- Nugroho, A. (2021). "Analisis Perbandingan Pembuktian Saksi dan Ahli dalam Sistem Peradilan Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7 No. 1, pp. 45-60.
- Ramadani, M. (2018). "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Saksi dan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Perdata". Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia. Kongres Hukum Indonesia (2019).